

## **ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**Risman Togala**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sulawesi Tenggara  
[alysarisman01@gmail.com](mailto:alysarisman01@gmail.com)

**Ahmad Muhardin Hadmar**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sulawesi Tenggara  
[ahmadmuhardin@gmail.com](mailto:ahmadmuhardin@gmail.com)

Utami Nur

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjungpura  
[utaminur@fisip.untan.ac.id](mailto:utaminur@fisip.untan.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pemuda merupakan kelompok strategis dalam demokrasi Indonesia. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, keterlibatan pemuda akan sangat menentukan arah kepemimpinan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus kualitatif, yang menggabungkan analisis isi dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pusat Statistik (BPS), laporan lembaga survei, publikasi organisasi masyarakat sipil, dan konten digital terkait partisipasi pemuda. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber. Analisis dilakukan melalui tiga aspek utama: tingkat partisipasi pemuda dalam pemilihan kepala daerah; dinamika partisipasi politik pemuda; dan kualitas demokrasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam pemilihan kepala daerah 2024 menurun menjadi 68,1%, meskipun mereka tetap menjadi mayoritas pemilih. Partisipasi tidak hanya mencakup proses pemilihan tetapi juga aktivisme digital dan peran pengawas demokrasi. Namun, literasi politik yang rendah, disinformasi yang merajalela, dan kepercayaan yang lemah terhadap lembaga tetap menjadi kendala utama. Temuan ini menegaskan bahwa energi besar kaum muda harus dioptimalkan melalui pendidikan politik, literasi digital, dan transparansi lembaga demokrasi agar partisipasi mereka tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif dalam memperkuat demokrasi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pilkada 2024, Demokrasi Lokal, Partisipasi Politik

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia yang menggunakan sistem demokrasi dalam menentukan arah kepemimpinannya (Wahyuningsih, 2021). Sejak era reformasi 1998, pemuda menjadi elemen penting dalam penguatan kualitas demokrasi. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai kelompok dengan proporsi terbesar dalam komposisi penduduk Indonesia (Anggini, 2025). Potensi ini menempatkan pemuda sebagai penentu arah kebijakan dalam memperkuat konsolidasi demokrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, remaja adalah warga negara berusia 16-30 tahun ( Sari et al., 2024). Pemuda berperan strategis sebagai kekuatan strategis dalam demokrasi Indonesia, khususnya dalam momentum Pilkada Serentak Pilkada. Secara demografis, pemuda memiliki kekuatan dominan dalam menentukan arah hasil pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah (Mulyadi et al., 2024; Mulyono, 2024). Dari total 204.807.222 pemilih tetap yang terdaftar, milenial dan generasi Z menyumbang 56,45% atau lebih dari 115 juta pemilih (Qolbun Sallim et al., 2025).

Namun, potensi besar ini tidak serta merta menjamin kualitas partisipasi politik yang tinggi. Berbagai kendala masih muncul, antara lain kesadaran politik yang

rendah, terbatasnya akses informasi, ketidakpercayaan terhadap lembaga demokrasi, dan praktik politik uang yang dapat melemahkan idealisme generasi muda (Ayunda et al., 2025; Azirah, 2024; Hemafitria et al., 2021; Nugraha et al., 2025). Situasi ini menyebabkan beberapa anak muda memilih untuk menjadi apatis atau enggan menggunakan hak suara mereka. Padahal, tanpa partisipasi aktif generasi muda, demokrasi lokal berisiko kehilangan energi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman (Mulyadi et al., 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan dinamika baru dalam partisipasi politik pemuda (Simbine & Oyekanmi, 2025). Media sosial kini menjadi ruang penting bagi pemuda untuk menyuarakan pandangan, mengkritik kebijakan, bahkan mengorganisir gerakan politik (Lady, 2023). Pemanfaatan ruang digital ini telah melahirkan bentuk alternatif partisipasi politik yang lebih interaktif dan inklusif. Namun, tantangan seperti disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini publik di ruang digital juga berpotensi menurunkan kualitas partisipasi pemuda (Heniasari et al., 2025; Mulyadi et al., 2024).

Mulyadi dkk (2024) pendidikan merupakan agenda yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk membangun kesadaran

politik pemuda (Rahmawati & Tjenreng, 2025). Pendidikan politik yang efektif dapat meningkatkan literasi politik, menumbuhkan kesadaran kritis, dan membekali pemuda dengan kemampuan untuk berpartisipasi secara rasional dan konstruktif (Mulyono, 2024). Tanpa pendidikan politik yang memadai, sejumlah besar pemilih muda hanya akan menjadi angka statistik tanpa dampak yang berarti terhadap demokrasi.

Keterlibatan pemuda dalam Pilkada 2024 juga termasuk peran mereka sebagai pengawas jalannya demokrasi (Azirah, 2024). Pemuda memiliki kapasitas untuk mencegah praktik politik uang, kecurangan pemilu, dan penyalahgunaan kekuasaan. Buscato et al (2024) kehadiran pemuda dalam peran ini menunjukkan bahwa partisipasi mereka tidak berhenti pada tahap pemungutan suara, tetapi juga meluas ke fungsi kontrol dan advokasi demokratis. Dengan demikian, pemuda merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses politik di tingkat lokal.

Noer Arfah dkk (2025) dukungan signifikan dari pemuda terhadap kandidat tertentu akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah terpilih. Pemimpin terpilih dengan dukungan besar dari pemuda akan didorong untuk mengakomodasi aspirasi mereka dalam kebijakan publik (Rifai & Haeril, 2025).

Hal ini akan memperkuat tata kelola yang lebih partisipatif, responsif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat ikatan sosial antara pemerintah daerah dan generasi muda sebagai mesin pembangunan.

Meskipun ada banyak literatur tentang pemuda dan pemilu, sebagian besar penelitian berfokus pada dominasi pemuda dalam demografi pemilih (Mulyadi et al., 2024; Mulyono, 2024). Namun, beberapa penelitian telah menyoroti aspek kualitatif partisipasi politik pemuda di tingkat regional, seperti keterlibatan mereka dalam kegiatan digital, partisipasi mereka dalam proses demokrasi, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal. Temuan ini menyoroti perlunya analisis yang lebih komprehensif dalam mengkaji kontribusi empiris yang signifikan dari pemuda terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis partisipasi pemuda dalam Pilkada 2024 sangat relevan untuk dilakukan (Rusli, 2025). Penelitian ini tidak hanya menggambarkan tingkat partisipasi politik pemuda, tetapi juga mengkaji dinamika partisipasi dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan politik pemuda sekaligus memperkuat demokrasi inklusif Indonesia.

Untuk memandu analisis, permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik pemuda dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dinamika partisipasi politik pemuda?
3. Apa implikasi partisipasi politik pemuda terhadap kualitas demokrasi lokal di Indonesia?

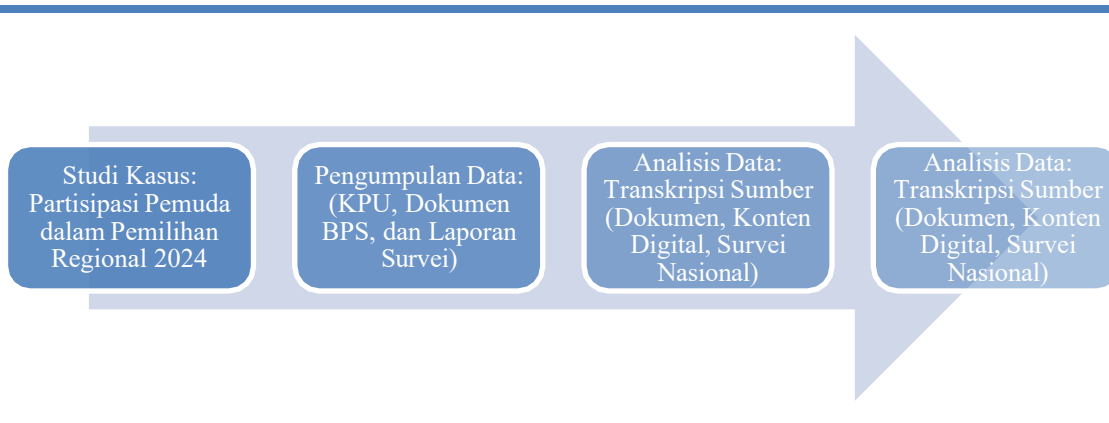
## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi partisipasi pemuda dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena partisipasi politik pemuda secara kontekstual dan mendalam dalam kerangka demokrasi lokal. Sumber data utama untuk penelitian ini berasal dari dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2024), publikasi Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), laporan lembaga survei periode 2015–2024, dan publikasi organisasi masyarakat sipil terkait keterlibatan pemuda dalam Pilkada Serentak 2024.

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik dalam kerangka penelitian kualitatif. Temuan dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu: tingkat partisipasi pemuda dalam pilkada; dinamika partisipasi politik pemuda; dan kualitas demokrasi lokal. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil analisis dokumen, konten digital, dan data sekunder dari survei nasional (Wahyuningsih, 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana pemuda membangun partisipasi politik mereka dalam pemilu 2024, baik melalui saluran formal maupun informal, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas demokrasi lokal.

Sebelum menampilkan gambar tahapan penelitian, perlu dijelaskan bahwa penelitian ini disusun berdasarkan kerangka metodologis yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan keterpaduan antara tujuan penelitian, sumber data, serta teknik analisis yang digunakan. Kerangka ini dirancang untuk menggambarkan alur penelitian secara kronologis dan logis, mulai dari penetapan fokus kajian hingga proses analisis data, sehingga setiap tahapan saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian.

Berikut ini menampilkan tahapan Indonesia.



penelitian.

## HASIL PENELITIAN

### Tingkat Partisipasi Politik Pemuda dalam Pilkada

Data partisipasi pemuda dalam Pemilu Daerah 2024 menunjukkan bahwa generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial, merupakan kelompok pemilih yang signifikan dengan kontribusi sekitar 53-55% dari total jumlah pemilih (Mulyono, 2024). Partisipasi pemuda ini tidak hanya diukur dengan jumlah yang menggunakan hak pilihnya, tetapi juga dengan tingkat kesadaran politik dan sikap kritis mereka terhadap pemimpin dan sistem politik yang ada.

Pemilih muda cenderung lebih adaptif terhadap modernisasi, sehingga mereka membutuhkan pemimpin yang sesuai dengan karakter generasinya. Partisipasi ini mencerminkan tingkat kepercayaan anak muda terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung di

Tabel 1. Tren Partisipasi Pemilih Pemuda

Tahun	Jenis Pilihan	Partisipasi Pemilih (%)
2015	Pilkada Serentak	70
2017	Pilkada Serentak	74
2018	Pilkada Serentak	73.2
2019	Pilpres dan Pileg	35-40
2020	Pilkada Serentak	76.9
2024	Pilkada Serentak	68.1

Sumber: (*The Indonesian Institute*, 2024)

Tabel 1 menunjukkan dinamika partisipasi pemilih muda dalam pemilu Indonesia periode 2015–2024. Ini merupakan indikator penting dari kegiatan politik generasi muda. Pada Pilkada Serentak 2015–2020, partisipasi pemilih muda relatif tinggi dengan rata-rata 70–77%, namun menurun signifikan pada Pilkada 2024 menjadi 68%, angka terendah sejak pemilu serentak digelar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa terdapat faktor kontekstual dalam proses pelaksanaan

pemilihan kepala daerah.

Tingginya partisipasi dalam Pemilu 2020 sangat dipengaruhi oleh konteks pandemi Covid-19 yang mendorong mobilisasi politik berbasis solidaritas sosial dan isu kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, pada Pilkada 2024, akan terjadi penurunan partisipasi pemuda yang signifikan yang dipicu oleh meningkatnya arus disinformasi, polarisasi politik, dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga demokrasi (Heniasari et al., 2025; Mulyadi et al., 2024). Fenomena ini tercermin dari maraknya wacana di media sosial dengan munculnya tagar populer seperti #PilkadaDamai, #PilkadaSerentak, #PeringatanDarurat, serta penyebaran berita hoaks tentang kandidat dan isu politik identitas.

Literasi politik yang rendah membuat sebagian besar pemuda sulit untuk memilah informasi yang valid, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh isu-isu manipulatif (Nugraha et al., 2025). Kondisi ini menurunkan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan partai politik, yang pada akhirnya melemahkan motivasi generasi muda untuk berpartisipasi. Penurunan partisipasi pemuda dalam Pilkada 2024 mencerminkan interaksi kompleks antara rendahnya literasi politik, krisis kepercayaan terhadap institusi, dan dominasi disinformasi di ruang digital.

### **Dinamika Partisipasi Politik Pemuda**

Partisipasi politik pemuda di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan sosial-budaya. Di era digital saat ini, pemuda tidak hanya berpartisipasi melalui sarana konvensional seperti pemungutan suara, tetapi juga melalui aktivisme digital yang melibatkan kampanye media sosial, petisi online, dan diskusi virtual (Nugraha et al., 2025). Fenomena ini memungkinkan generasi muda untuk mengekspresikan aspirasi politiknya secara lebih bebas dan luas tanpa kendala struktur formal, sehingga menghasilkan desentralisasi dan demokratisasi dalam partisipasi politik. Aktivisme digital ini tidak hanya memperkuat suara pemuda di bidang politik, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk membangun identitas kolektif dan kepekaan sosial terhadap isu-isu ketidakadilan dan perubahan sosial.

Selain bentuk partisipasi yang semakin kreatif dan digital, pemuda kini menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi politik dan risiko penyebaran disinformasi di ruang digital (Anggini, 2025; Heniasari et al., 2025). Sementara media sosial menyediakan platform yang inklusif, penting bagi kaum muda untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam menyaring informasi agar partisipasi mereka

tidak berubah menjadi kegiatan manipulatif atau partisipasi semu. Literasi digital dan pendidikan politik merupakan aspek penting dalam memperkuat partisipasi politik yang bertanggung jawab dan berdampak positif pada demokrasi Indonesia. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam organisasi politik formal dan kegiatan sosial juga masih membutuhkan perhatian untuk meningkatkan aktivitasnya di berbagai ranah politik yang lebih luas.

Perubahan pola partisipasi politik pemuda juga menunjukkan pergeseran dari model partisipasi hierarkis dan formal ke model jaringan digital (Buscato et al., 2024). Kaum muda cenderung lebih memilih cara partisipasi spontan dan kolaboratif, misalnya melalui gerakan sosial online, penggunaan tagar untuk kampanye, dan meme sebagai kritik sosial. Dinamika ini menunjukkan bagaimana generasi muda menggunakan teknologi dan media yang telah mereka kuasai untuk menentukan bagaimana berpolitik yang sesuai dengan gaya hidup dan nilai-nilai mereka. Namun, memastikan partisipasi politik pemuda tetap produktif dan konstruktif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan ekosistem politik yang inklusif dan demokratis.

## **Kualitas Demokrasi Lokal**

Kualitas demokrasi lokal merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan administrasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat di tingkat daerah. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dihitung oleh Badan Persatuan Nasional dan Politik (Kesbangpol) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kualitas demokrasi melalui gabungan indikator kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi di daerah (BPS, 2023). Data tahun 2024 menunjukkan tren penurunan nilai IDI di beberapa provinsi, dengan Provinsi Kepulauan Riau sebagai contoh menurun dari 79,53 pada tahun 2021 menjadi 76,48 pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi lokal yang berkualitas, meski masih dalam kategori baik. Aspek yang mendapat skor rendah antara lain kinerja lembaga legislatif, netralitas penyelenggara pemilu, serta transparansi anggaran dan edukasi politik bagi kader partai politik.

Beberapa indikator kunci dalam kualitas demokrasi lokal termasuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, akses yang sama terhadap sumber daya, dan kebebasan untuk mengekspresikan aspirasi (Azirah, 2024; Wanita, 2023; Nugraha et al., 2025). Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan kebebasan berkumpul,

berekspresi, dan berpendapat yang masih belum optimal, yang tercermin dari rendahnya skor aspek kebebasan di beberapa daerah. Selain itu, pemerataan dalam akses ekonomi dan perlindungan sosial juga masih menjadi kendala yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal secara keseluruhan. Kinerja lembaga demokrasi, termasuk legislatif dan penyelenggara pemilu, perlu diperkuat dalam rangka memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik yang merugikan.

Peran masyarakat sipil dan lembaga penyelenggara pemilu sangat strategis dalam membangun kualitas demokrasi lokal (Wahyuningsih, 2021). Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan pemilu dan pendidikan politik dapat mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih berkualitas dan substansial. Penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, diharapkan tidak hanya melakukan sosialisasi sebagai transfer informasi, tetapi juga membangun dialog dua arah yang meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap visi calon kepala daerah dan rekam jejak mereka. Sinergi antara pemerintah daerah, partai politik, media lokal, dan tokoh masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang inklusif dan

partisipatif di tingkat lokal, sehingga demokrasi di daerah dapat berkembang menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

Tingkat partisipasi politik pemuda dalam Pilkada Serentak 2024 menunjukkan tren yang cukup dinamis. Meski generasi milenial dan generasi Z tetap menjadi kelompok dominan dalam jumlah pemilih, persentase partisipasi mereka menurun signifikan dari 76,9% pada Pilkada 2020 menjadi 68,1% pada 2024. Fenomena ini mengindikasikan potensi krisis partisipasi yang patut mendapat perhatian serius, mengingat pemuda merupakan pilar utama keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Kemunduran ini tidak bisa diartikan semata-mata sebagai bentuk apatis politik, tetapi juga sebagai refleksi transformasi pola partisipasi generasi muda. Sejalan dengan teori partisipasi politik Verba, Nie, dan Milbrath, partisipasi politik tidak hanya diukur dengan kehadiran di TPS, tetapi juga dengan sikap kritis dan keterlibatan dalam wacana publik (Prakasa et al., 2025). Generasi muda yang adaptif terhadap modernisasi lebih memilih saluran partisipasi non-elektoral seperti aktivisme digital, diskusi publik, dan kampanye berbasis isu. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian Simbine & Oyekanmi (2025) di Afrika, di mana pemuda mengalihkan partisipasi formal ke

partisipasi digital, meskipun menghadapi tantangan disinformasi dan literasi politik yang rendah.

Transformasi digital telah membuka ruang baru bagi partisipasi pemuda melalui media sosial, petisi online, dan kampanye berbasis tagar. Tagar populer seperti #PilkadaDamai, #PilkadaSerentak, dan #PeringatanDarurat mencerminkan ekspresi politik kolektif generasi muda di ruang digital. Namun, pola partisipasi ini juga menimbulkan risiko berupa partisipasi semu, polarisasi, dan paparan hoaks yang melemahkan kualitas musyawarah publik. Literasi politik yang rendah membuat sulit bagi pemuda untuk membedakan informasi yang valid dari disinformasi, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan pada lembaga demokrasi.

Hubungan sebab-akibat ini dapat diartikan melalui kerangka kepercayaan politik dan kualitas demokrasi. Literasi politik yang rendah membuat pemuda lebih rentan terhadap manipulasi informasi dan disinformasi. Kerentanan ini melemahkan kepercayaan politik, terutama terhadap partai, penyelenggara pemilu, dan lembaga demokrasi. Penurunan kepercayaan ini berdampak langsung pada penurunan partisipasi substantif, yaitu keterlibatan berdasarkan kesadaran kritis dan orientasi terhadap kepentingan publik. Akibatnya, kualitas demokrasi juga menurun, karena partisipasi politik yang lemah dan tidak

berbasis pengetahuan tidak mampu menopang prinsip akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi dalam proses politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian internasional di Eropa Barat yang menunjukkan bahwa krisis kepercayaan institusional berdampak langsung pada penurunan partisipasi anak muda dalam pemilu (Buscato et al., 2024).

Selain menjadi pemilih, pemuda juga berperan penting sebagai penjaga demokrasi. Keterlibatan mereka sebagai relawan pemilu dan pengawas digital berkontribusi pada integritas proses politik di tingkat lokal. Peran ini sejalan dengan perspektif demokrasi deliberatif Habermas yang menekankan pentingnya partisipasi warga dalam fungsi pengawasan dan dialog publik untuk memperkuat legitimasi demokrasi. Namun, data dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan penurunan skor dalam hal kebebasan berekspresi, transparansi lembaga legislatif, dan netralitas penyelenggara pemilu. Kondisi ini menegaskan bahwa tingginya partisipasi kuantitatif pemuda belum secara otomatis menghasilkan kualitas demokrasi yang substansial.

Tantangan utama bagi demokrasi Indonesia tidak hanya untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemuda, tetapi untuk memastikan partisipasi yang bermakna. Pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan literasi digital, dan transparansi

lembaga demokrasi perlu menjadi prioritas agar energi besar generasi muda tidak berhenti pada statistik, tetapi memberikan kontribusi nyata untuk memperkuat demokrasi lokal yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pemuda tetap menjadi kelompok strategis dalam Pilkada Serentak 2024. Namun, tingkat partisipasi mereka justru mengalami penurunan yang signifikan menjadi 68,1%, yang merupakan angka terendah sejak pemilu serentak pertama kali diadakan. Fenomena ini mengindikasikan tantangan serius dalam menjaga konsistensi partisipasi politik pemuda di tengah kompleksitas sosial politik yang semakin meningkat. Pola partisipasi generasi muda juga telah bergeser, dari partisipasi konvensional di TPS ke bentuk baru melalui aktivisme digital, kampanye online, dan gerakan solidaritas berbasis isu. Namun, literasi politik yang rendah, disinformasi digital yang merajalela, dan melemahnya kepercayaan pada lembaga demokrasi masih menjadi faktor penghambat utama.

Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi kuantitatif pemuda yang tinggi tidak secara otomatis sebanding dengan kualitas demokrasi lokal. Data dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang

menunjukkan penurunan skor dalam aspek kebebasan berekspresi, kinerja legislatif, dan transparansi penyelenggara pemilu menunjukkan perlunya perbaikan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat literasi politik, meningkatkan kualitas sosialisasi pemilu, dan memperluas ruang partisipasi non-elektoral yang substansial bagi generasi muda.

Penelitian ini terbatas pada analisis dokumen sekunder sehingga belum menangkap pengalaman subjektif anak muda secara langsung. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menekankan peran literasi politik dan kepercayaan politik dalam menjelaskan hubungan antara partisipasi pemuda dengan kualitas demokrasi. Penelitian ini menyoroti dimensi substantif dan dinamika digital yang membentuk pola baru keterlibatan politik generasi muda. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi politik yang kreatif, peningkatan literasi politik dan digital, serta responsivitas partai dan kandidat terhadap isu-isu pemuda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, P. (2025). Peran Pemuda Dalam Politik Lokal Dan Pemilihan Kepala Daerah 2024. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 80–83. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.180>
- Ayunda, N. D., Zusrieka, M., Pramesyanti, C. Z., Ramzy Sarman, M. K. M., & Ridwan, R. (2025). Partisipasi Politik Masyarakat Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024: Studi Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2685>
- Azirah. (2024). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi. *Journal of Law and Governement Science Vol. 10 No.2 Oktober 2024*, 10(2), 10–21.
- BPS. (2023). Statistik Politik. In *Statistik Indonesia 2024* (Vol. 14, Issue 1). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Buscato, F. G., Entong, J., & Bacang, A. G. (2024). Youth and Elections: Exploring Mobilization and Participation Influences. *Journal of Interdisciplinary Perspectives*, 2(7), 55–67. <https://doi.org/10.69569/jip.2024.0085>
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Heniasari, R. D., Aliftania, D., Adzania, K. H., Setiawan, D., & Nugraha, J. T. (2025). Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Magelang. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 3(1), 40–55. <https://doi.org/10.61332/antasena.v3i1.298>
- Lady, C. (2023). The Influence of Young Activist on Instagram and Twitter Towards Youth Political Participation in the 2024 Indonesia General Election: Study Case of Bandung City [Wenzao Ursuline University of Languages]. In *Wenzao Ursuline University of Languages* (Vol. 3, Issue 1). [https://c030.wzu.edu.tw/datas/upload/files/GP\\_1109209510\\_Christabel\\_Lady\\_.pdf](https://c030.wzu.edu.tw/datas/upload/files/GP_1109209510_Christabel_Lady_.pdf)
- Mulyadi, D., Megawati, L., Aulia, S. H., Garnita, C. F., Asriani, F., Mawardi, M. F., Saputra, A. R., & Nagara, M. A. D. (2024). Political Participation Behavior: Young People's Enthusiasm for the 2024 Presidential and Vice-Presidential Elections. *Journal of Legal Studies*, 33(47), 116–139. <https://doi.org/10.2478/jles-2024-0008>
- Mulyono, A. (2024). Gen Z Political Participation in the 2024 Simultaneous Elections. *Informatika Dan Sains*, 14(1), 1099–1107. <https://doi.org/10.54209/infosains.v14i01>
- Noer Arfah, I., Junaedi, J., & Mustari, N. (2025). Political Dynamics and Challenges of Local Elections 2024 in Bulukumba Regency, Indonesia. *Journal of Contemporary Local Politics*, 4(1), 117–128. <https://doi.org/10.46507/jclp.v4i1.710>

- Nugraha, A., Garvera, R. R., & Sujai, I. (2025). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2024*. 3(5), 90–102. <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/469>
- Prakasa, S. E., Zafira, N. L., & Heryanto, Y. (2025). The Role of The National Unity and Political Agency in Increasing Political Participation in The 2024 Election Era. *Jurnal Polisci*, 2(6), 429–443. <https://doi.org/10.62885/polisci.v2i6.824>
- Qolbun Sallim, P., Hamdani, Z., Dwi Riyani, A., Sukma, S., & Rahma Sari, F. (2025). Peran Gen Z Dalam Mencerdaskan Pemilih Pada Pemilu 2024. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 9(1), 91–108. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1555>
- Rahmawati, N. B., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 313–323. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>
- Rifai, R., & Haeril, H. (2025). Post-Electoral Political Exclusion Following the 2024 Simultaneous Regional Elections in West Nusa Tenggara (NTB). *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 7(1), 109–119. <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/1841>
- Rusli, D. (2025). The Role of Local Government in Increasing Young Voter Participation in the 2024 Regional Head Elections. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(03), 198–209. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i03>
- Sari, F. K., Astria, B. M., & Alisa, S. (2024). Peran dan Tantangan Generasi Muda dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(5), 121–131. <https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/45>
- Simbine, A., & Oyekanmi, O. (2025). Contemporary Trends in African Elections (2013-2023). *African Journal of Inter/Multidisciplinary Studies*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.51415/ajims.v7i1.1635>
- The Indonesian Institute, C. F. P. P. R. (2024). *Presepsi Anak Muda Terhadap Pemili dan Pilkada Serentak Tahun 2024* (Vol. 2024). [https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2023/01/Laporan-Persepsi-Anak-Muda-Terhadap-Pemilu-dan-Pilkada-Serentak\\_Periode-Desember-2022\\_4-Januari-2023.pdf](https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2023/01/Laporan-Persepsi-Anak-Muda-Terhadap-Pemilu-dan-Pilkada-Serentak_Periode-Desember-2022_4-Januari-2023.pdf)
- Wahyuningsih, C. D. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 58. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1966>